PENGARUH PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA ANAK

David Soroz

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok Jawa Barat, Indonesia
email: davidsoroz453@gmail.com

Abstract

This research focuses on reports on the results of social research (Litmas) used in the case trial of children, which will be taken into consideration by judges in deciding or imposing penalties for children in conflict with the law. The approach used in this study is a qualitative approach to the type of explanatory research or the so-called type of research explains the research objectives namely the process of making a report on the results of social research that will later be used by the judge as consideration Based on the results of the research conducted, it is known that for the trial of children, 90% of judges have not considered and paid attention to the social research report carried out by the social counselor Suggestions recommended by a social counselor in a social research report for a child are inversely proportional to the verdict given to the child The basics.

Keywords: *community; court rulings; children's matters*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang digunakan dalam persidang perkara anak, dimana akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatori atau yang disebut dengan tipe penelitian menjelaskan sasaran penelitian yakni proses pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang nantinya akan digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan untuk persidangan anak, 90% hakim belum mempertimbangkan dan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan Saran yang dianjurkan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatan untuk seorang anak berbanding terbalik dengan putusan yang diberikan kepada anak.

Kata Kunci: kemasyarakatan; putusan pengadilan; perkara anak

Pendahuluan

Situasi dan kondisi yang berkembang seperti saat ini, dapat diketahui pula bahwa pelanggaran hukum serta tingkat pelanggaran hukum juga semakin berkembang. Tidak hanya orang dewasa yang terlibat dengan pelanggaran hukum, akan tetapi anak-anak pun tak jarang dapat terlibat dalam pelanggaran hukum yang mengakibatkan mereka pun bisa berada di dalam lembaga pemasyarakatan, yang sebenarnya hal tersebut dapat mengganggu masa pertumbuhan mereka sebagai anak.

Dengan merebaknya kasus kejahatan terhadap anak atau anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dewasa ini dikenal sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sungguh sangat mengkhawatirkan bagi berbagai pihak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana (Nugroho, 2017). Hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya pelaku kriminal di bawah umur (Soetodjo, 2006). Kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik (Sitompul, 2015). Padahal anak sebagai generasi muda yang merupakan sumber daya manusia memerlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dimasa depan.

Dalam konvensi hak anak perserikatan bangsa-bangsa (PBB), menyatakan seorang anak adalah seorang yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 45 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun (Afifah, 2014). Sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam usia yang demikian, anak berbeda dengan orang dewasa dalam kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya (Indonesia, 1997).

Anak tidak mampu membentuk dirinya sendiri, akan tetapi memerlukan orang lain disekitarnya untuk mendukung perkembangannya. Sehingga dalam hal ini keluarga mempunyai peranan paling besar terhadap perkembangan psikologi anak. Keluarga sangat penting karena mereka merupakan orang-orang terdekat anak yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan pemulihan (Wahyudi, 2015). Proses perkembangan psikis anak adalah salah satu proses yang unik dan kompleks, hal ini dikarenakan anak

mempunyai dunia yang khas dan sangat berbeda dengan dunia kita sebagai orang dewasa. Beberapa aspek pokok adalah perkembangan intelegensi, perkembangan emosi, perkembangan sosial perkembangan moral (Kartini, 1984).

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mental maupun jasmani, anak akan lebih muda dididik dan diberikan pelajaran serta akan lebih muda memperbaiki jika melakukan suatu kesalahan dibandingkan jika mendidik orang dewasa. Lingkungan sekitar akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan dan dilaksanakan sedini mungkin mengingat anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi terwujudnya pembangunan nasional (Andi Nurhidayah, 2019).

Berdasarkan hal tersebut diatas anak-anak yang melakukan tindak pelanggaran hukum, memerlukan penanganan secara khusus baik perangkat hukumnya yang berupa undang-undang atau peraturan lainnya, dan lembaga-lembaga yang berperan didalamnya, misalnya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan berbagai peraturan lainnya yang adalah dasar hukum untuk penanganan masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan anak yang melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan social lainnya.

Balai Pemasarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sari, 2019). Balai Pemasarakatan, di Direktorat Jendral Pemasarakatan, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah salah satu lembaga yang dilibatkan dalam penanggulangan kenakalan anak dan dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara jelas menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) uap Pemasarakatan mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap setiap anak yang melakukan pelanggaran hskum uriuua adanya penelitian kernasyrakatan, Hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara anak, apakah anak dijatuhi tindakan, dipidana, pidana bersyarat, pidana pengawasan atau diserahkan kepada orang tualwalinya, keluarga asuh, Kementerian Sosial Organisasi Sosial untuk pelatihan keterampilan. Di dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan bimbingan klien pemasarakatan sudah barang tentu berpedoman pada dasar hukum yang berlaku dan peraturan yang mendukung terlaksananya tugas pembinaan dan pembimbingan. Untuk memberikan dukungan dan perlindungan baik secara fisik maupun psikis kepada anak, maka seorang

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib hadir dalam persidangan anak, juga kehadiran orang tua wali, dan relawan pembimbing kemas yarakatan (VPO) sehingga anak tersebut akan merasa dirinya dilindungi, sesuai yang tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang P'engadilan Anak menyatakan bahwa "Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2, Penuntut Umam, Penashat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) orang tua, wali, atau orang tua aun dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak" Pada saat hakim memeriksa perkara anak dalam pelaksanaan proses pengadilan tersebut, hakim perlu memperhatikan hal yang disebutkan pada pasal 55 tersebut dan apabila orang tua tidak dapat hadir/berhalangan hadir, maka klien didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan. Hakim harus memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dalam persidangan perkara anak. Jika tidak ada laporan penelitian kemasyarakatan, hakim dapat menunda proses persidangan anak tersebut sesuai Pasal 56 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi, "Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan". Pasal 59 (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa, "Putusan yang diambil oleh hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan". Dengan diperlukannya laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dalam persidangan anak maka pembimbing kemastarakatan harus segera membuat laporan tersebut untuk diserahkan kepada hakim sebelum sidang dimulai seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat I Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi, Pembmbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas 1. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan, 2. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan hanus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pasal 33 huruf a (1) dalam proses diamandemen, definisi "membantu" telah diganti, karena pembimbing kemasyarakatan, jaksa, hakim, maupun penyidik persamaan derajat dalam tugas yang diemban. Jadi pembimbing kemasyarakatan bukan hanya bertugas sebagai yang membantu, tetapi memiliki tugas yang khusus sebagai sesama penegak hukum Balai Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan anak-anak nakal karena di dalam proses peradilan pidana terpadu,

petugas masyarakat mempunyai andil sebagai penegak hukum seperti yang diuraikan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat yang berbunyi "Petugas Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat I merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan masyarakat (Indonesia, 1995). Dengan pelaksanaan pembuatan laporan penelitian masyarakat yang dilaksanakan oleh pembimbing masyarakat di balai masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan proses peradilan anak Laporan penelitian masyarakat tersebut hendaknya dapat dipertanggung jawabkan yang didukung oleh data yang valid dengan kata lain laporan penelitian masyarakat yang dibuat tersebut harus berkualitas. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan penulis seperti diatas maka dengan alasan dan gagasan yang tersebut penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Penelitian Masyarakat (Litmas) Dalam Putusan Pengadilan Perkara Anak.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dimana strategi yang digunakan lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena. Dengan tipe penelitian eksplanatori atau yang disebut dengan tipe penelitian menjelaskan sasaran penelitian yakni proses pembuatan laporan hasil penelitian masyarakat yang nantinya akan digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan studi dokumentasi. Artinya dalam melengkapi pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya yang akan dibahas, kajian kepustakaan dalam bentuk buku-buku, diktat-diktat maupun majalah-majalah atau artikel-artikel dan sumber-sumber lainnya menjadi bahan kajian penulis serta memilih bahan-bahan kajian tersebut yang ada kaitannya dengan penulisan karya tulis ini. Selain itu, penulis mempelajari pula dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini misalnya laporan dan catatan.

Hasil dan Pembahasan

Pidana dan Tindakan yang dapat Dijatuhkan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Menurut Pasal 23 (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Seorang anak nakal dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pidana Pokok Pidana pokok yang dapat dijatuhi kepada anak nakal yaitu

- 1) Pidana Penjara Pidana penjara bagi anak nakal menurut pasal 26 (1) dan (2) Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbeda dengan orang dewasa bagi anak nakal lamanya pidana penjara $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa, apabila anak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun
- 2) Pidana Kurungan Sebagaimana dalam pasal 27 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa
- 3) Pidana Denda, atau Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak 12 dan maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 4) Pidana Pengawasan
Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana, pasal 30 (1)(2) dan (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Lamanya paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.
 - b) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dalam pengawasan jaksa dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan
- b. Pidana Tambahan
Selain pidana pokok, anak nakal dapat dijatuhi pidana tambahan yang berupa: (1)Perampasan barang-barang tertentu dan atau; (2) Pembayaran ganti rugi
- c. Tindakan
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang terdapat dalam pasal 24 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan:
 - 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
 - 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
 - 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- d. Pidana Bersyarat
Ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal diatur dalam pasal 29 Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bagi Anak dalam Persidangan

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dianggap sangat penting sehingga memerlukan undang-undang khusus atau peraturan yang mengatur tentang persidangan perkara anak tersebut. Sebab anak memerlukan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai dalam berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu diadakannya Undang-Undang Pengadilan Anak tersendiri. Suatu kenyataan bahwa sekalipun belum ada undang-undang yang mengatur tentang persidangan anak, maka demi keberlangsungan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka diadakannya Surat Keputusan bersama antara Penegak Hukum (GAKKUM) di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Kemudian dibuat Surat Edaran atau Surat Keputusan oleh Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung dan di dalam surat edaran keputusan tersebut. Perlu adanya perlindungan hukum secara tersendiri dalam setiap pengambilan putusan hakim agar apa yang diputuskan oleh hakim tidak banyak merusak citra seorang anak sebagai penerus bangsa yang baik. Sehingga anak tersebut mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan hal ini memerlukan pembinaan yang secara terus menerus demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan dan perlindungan dan segala kemungkinan yang dapat merusak citra penerus bangsa di masa depan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat memberikan kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat melanjutkan keberlangsungan hidup dengan normal di masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33, seorang pembimbing kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan.

Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Nakal

Kegunaan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak bagi hakim bahwa dalam memutuskan suatu perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari balasan masyarakat mengenai data pribadi maupun keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan mempelajari laporan hasil penelitian. Seorang hakim wajib kemasyarakatan tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Maka disinilah pentingnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan kemasyarakatan, jika ada tahanan anak maka polisi harus segera memberitahukan kepada balai pemasyarakatan setempat untuk selanjutnya balai pemasyarakatan akan menunjuk seorang pembimbing kemasyarakatan yang akan membuat penelitian kemasyarakatan terhadap tahanan anak yang bersangkutan. Sehingga hakim mempunyai kesempatan untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dan jaksa dapat memberitahukan kepada pembimbing kemasyarakatan tersebut untuk menghadiri persidangan anak. Sebab tanpa penelitian kemasyarakatan dan hadimya pembimbing kemasyarakatan dalam sidang tersebut maka putusan hakim "batal demi hukum". Karena putusan hakim sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, maka hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya. sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan bagi seorang pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai pedoman untuk pembimbing kemasyarakatan dalam menentukan dan melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan akan dilaksanakan untuk klien yang akan dibimbing. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam persidangan anak dibagi dalam tiga tahap, yang pertama tugas pembimbing kemasyarakatan sebelum persidangan atau Pre-Adjudication, seorang pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang anak berlangsung seorang pembimbing kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan dan membuat laporannya untuk segera diserahkan kepada hakim agar hakim bersamaan dengan Berita Acara Polisi dan Surat Dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ironisnya laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang bersifat "Rahasia" itu sebelum sampai pada hakim, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut melalui kepolisian dan jaksa sehingga terkadang pihak kepolisian meminta untuk menyamakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dengan surat berita acara polisi tersebut. Maka sifat kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu laporan hasil penelitian kemasyarakatan tidak dapat dijamin lagi. Yang kedua, tugas pembimbing kemasyarakatan selama sidang berlangsung yaitu selama hakim memeriksa perkara anak yang disebut Adjudication. Pada masa Adjudication, seorang pembimbing kemasyarakatan atas pemberitahuan jaksa akan hadir dalam sidang anak dengan membawa arsip dari laporan penelitian kemasyarakatan. Dalam Pasal

57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, "Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan" Yang ketiga, tugas pembimbing kemasyarakatan sesudah putusan hakim atau Post Adjudication yakni setelah penjatuhannya putusan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana ataupun tindakan yang diberikan diluar serhadap kliennya. Dan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien anak adalah dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan terhadap warga binaan kemasyarakatan termasuk didalamnya anak didik kemasyarakatan Dan dalam Pasal 34 ayat (1) b menunjukkan pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga kemasyarakatan..Berkut adalah peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses persidangan anak dan gambaran secara umum tentang pelaksanaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan bagi persidangan anak dengan metode dan tekniknyanya adalah sebagai berikut:

- a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Proses Persidangan Anak Pada Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 3 tahun tentang Pengadilan Anak, menerangkan bahwa
 - 1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyampaikan laporan hasil kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berisi:
- b. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan, sosial anak. dan penelitian.
- c. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam pasal yang tercantum diatas, menjelaskan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara persidangan anak sangat penting, baik sebelum pemeriksaan perkara yaitu dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Social Case Study), maupun selama dan setelah persidangan. Penelitian Kemasyarakatan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak di kemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim dalam

memutus perkara anak tidak di Bantu oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembuatan Laporan PenelitianKemasyarakatan maka hakim tidak mengetalvui keadaan yang sebenarnya dari si anak tersebut. Dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan berusaha data entang diri klien, memahami latar belakang dan sebab terjadi pelangsa hukum, kepribadian klien, kehidupan keluarga, sistem lingkungan sosiat. sejarah kejahatan, dan keadaan ekonomi anak tersebut. Dan dari data- data tersebut Pembimbing Kemasyarakatan menganalisa dan mengevaluasi sera memperhatikan kepentingan klien, keluarga, masyarakat dalam memberikan saran-saran kepada hakim Seorang Pembimbing Kemasyarakatan bukanlah seorang pembela hukum dari klien yang bermasalah tetapi memberikan laporan penelitian kemasyarakatan yang sewajarnya mengenai anak yang melanggar hukum

Keterampilan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Berbicara mengenai Sidang Anak, pada Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah disebutkan bahwa "Sidang Peradilan Anak yang selanjutnya disebut dengan sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak yang sebagaimanaditentukan dalam Undang-Undang ini". Yang dimaksud dengan perkara anak dalam Undang-Undang ini adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dilakukan oleh anak-anak yang masih tergolong di bawah umur. Dalam melaksanakan tugasnya pembimbing kemasyarakatan harus memiliki keterampilan yang memadai. Pada pasal 9 sampai 12 Keputusan Menteri Kehakiman RI No M02. PW.07.10 Tahun 1997 tentang tata tertip persidangan dan tata ruang sians disebutkan

1. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tenentu olen ketua pengadilan negeri dapat dilakukan pemeriksaan dengan hakim majelis
2. Pemeniksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup
3. Putusan pengadialan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 9)
4. Hakim, penuntut umum, penyidik, penaset hukum dan pembiming kemasyarakatan, dalam sidang anak tidak memakai toga (Pasal 10)
5. Selama dalam persidangan, selaku terdakwa anak harus didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. (Pasal 1).
6. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan pada balai pemsyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, menyampaikan laporan hasil penelitian

kemasyarakatan mengenai anak tersebut, agar dapat diketahui latar belakang kehidupan anak yang bersangkutan. (Pasal 12).

Dalam proses sidang peradilan anak benifat "Kekeluargaan sejak mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, pembuatan litmas, pemeriksaan di pengadilan dan perlakuan sesudah putusan dibimbing di Bapas atau di Lapas Menurut CM. Marianti Soewands dalam bukunya Pembimbing Kemasyarakatan dan Tugasnya dalam Proses Peradilan Anak hal: 10 mengatakan bahwa sidang anak bersifat kekeluargaan yaitu:

1. Lay out atau denah ruang sidang berbeda dengan orang dewasa
2. Didalam, persidangan anak terpisah dengan orang dewasa
3. Selama penahanan, anak terpisah dengan orang dewasa
4. Hakim tunggal.
5. Semua petugas sidang (Hakim, Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, Pembela Hukum) tidak memakai toga atau baju/seragam dinas
6. Hakim anak, jaksa anak, polisi, diangkat oleh atasannya dengan surat keputusan termasuk juga dengan pembimbing kemasyarakatan.
7. Sidang tertutup untuk umum dan putusan dibacakan secara terbuka.
8. Di dalam ruang pemeriksaan di kantor polisi berbeda dengan orang dewasa dan di tempatkan ruangan khusus
9. Dalam pemeriksaan anak, polisi tanpa seragam dinas.

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi khususnya laporan penelitian kemasyarakatan di pengadilan negeri telah terlaksana dengan baik, dengan memaksimalkan semua sumber daya yang ada, komunikasi dan kordinas yang dilakukan oleh pihak balai pemasyarakatan dengan instansi penegak hukum lainnya sangat baik. Selain itu Penelitian Kemasyarakatan sangat penting dan bermanfaat atau berpengaruh terhadap putusan pengadilan perkara anak sehingga diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan yang untuk sidang pengadilan anak. Penelitian Kemasyarakatan harus secara baik dan benar, sehingga diperlukan seorang pembimbing kemasyarakatan yang professional dalam pelaksanaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut.

Bibliografi

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Andi Nurhidayah, A. (2019). Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Perlindungan Anak Komporatif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*.
- Indonesia, R. (1995). Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. *Lembaran Negara RI*.

- Indonesia, R. (1997). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Lembaran Negara Republik Indones.*
- Kartini, K. (1984). *Psikologi Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161–174.
- Sari, S. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Universitas Islam Negeri Raden Fatah*.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.